



Buletin Parlementaria

Nomor 1049/III/IV/2019 • April 2019

Danau Toba Harus Dilestarikan



9 772614 339005

**Open Parliament Tandai Babak Baru
Praktik Demokrasi Dalam Negeri**

Hlm. 4

**Antisipasi Keributan Pemilu,
DPT Harus Transparan**

Hlm. 6

Danau Toba Harus Dilestarikan



Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing, Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun pada Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan DPR RI dan enam Pemerintah Kabupaten sekitar Danau Toba, di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Foto: Krespo I HR

Sektor pariwisata Danau Toba sudah mulai mengalami peningkatan. Hal itu didukung dengan banyaknya pembangunan-pembangunan infrastruktur jalan dan bandara udara yang memudahkan langsung bagi masyarakat untuk berwisata ke danau terbesar di Asia Tenggara itu. Untuk itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan (BURT) DPR RI Anthon Sihombing mengingatkan, Danau Toba adalah keajaiban dunia yang harus terus dilestarikan.

Hal itu diungkapkan Anthon saat memberikan sambutan pada Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan DPR RI dan enam Pemerintah Kabupaten sekitar Danau Toba, di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (05/4). Kegiatan ini mengambil tema; "Keindahan Panorama Danau Toba Sebagai Milik Masyarakat Dunia, dan Kesiapan Masyarakat untuk Menerima Danau Toba Sebagai Daerah Pariwisata, untuk Pembangunan Infrastruktur Menghadapi Tahun 2025".

"Sektor pariwisata Danau Toba sudah mulai mengalami peningkatan sedikit-sedikit, dikarenakan sudah banyaknya pembangunan infrastruktur

seperti jalan tol dan Bandara Udara Silangit yang memudahkan aksesnya," jelas Anthon. Diketahui, Danau Toba merupakan salah satu dari sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang sedang digencarkan oleh pemerintah agar menjadi "Bali Baru". Diharapkan, upaya ini dapat menarik minat wisatawan.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, di sisi lain ada faktor yang menyebabkan Danau Toba ditinggalkan oleh pengunjung, terutama dari luar negeri. Hal ini karena banyaknya penggunaan keramba di sekitar danau, sehingga pemerintah harus cepat dalam menghapus penggunaan keramba. "Banyak turis yang pikir jika ingin ke Danau Toba karena penggunaan keramba. Berbeda dengan dahulu, banyak yang menetap lama 2 bulan dan bermain ski di sekitar danau, padahal dulu infrastrukturnya belum sebagus sekarang," imbuh Anthon.

Untuk itu, Anthon berharap pemerintah pusat agar terus meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur di sekitar Danau Toba, agar sektor pariwisatanya kembali maju di Indonesia maupun dunia. "Saya mengharapkan siapapun pemerintahnya agar terus meningkatkan dan memperbaiki

infrastruktur di sekitar Danau Toba agar pariwisatanya menjadi favorit di Indonesia maupun dunia," imbuh Anggota Komisi V DPR RI itu.

Anthon menambahkan, proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dengan kontrak tahun jamak sudah mulai dibangun. Begitu pula dengan pembersihan atau pemeliharaan Danau Toba dari enceng gondok. Adapun kendala lainnya adalah anggaran yang minim terhadap pemerintahan kabupaten sekitar Danau Toba. Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara III ini pun menilai keramahtamahan masyarakat sekitar Danau Toba yang berbeda dengan masyarakat Bali.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun (F-Demokrat/ Sumatera Utara II), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Setjen dan BK DPR RI Muhammad Djazuli, jajaran Kesetjengan dan BK DPR RI, serta puluhan wartawan baik cetak, elektronik, dan daring yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI. ■ tn/sf

Tolok Ukur Keberhasilan Inspektorat Adalah Menyelamatkan Uang Negara



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto pada seminar yang diselenggarakan Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI bekerjasama dengan The Institute of Internal Auditors (IIA). Foto: Jaka I HR

Inspektorat memiliki peranan dalam melakukan pengawasan internal di setiap kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwasanya yang menjadi tolok ukur keberhasilan inspektorat adalah ketika ia berhasil menyelamatkan uang negara.

Hal tersebut diungkapkan Utut saat didapuk menjadi *keynote speaker* pada seminar yang diselenggarakan Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI bekerjasama dengan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) Indonesia, bertema 'Perempuan dalam Profesi Audit Internal di Indonesia Peluang dan Tantangan' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (02/4).

"Hemat saya keberhasilan Inspektorat itu bukanlah ketika ia berhasil memenjarakan orang, tapi mencegah pemborosan, mencegah anggaran yang tidak perlu, dan mencegah penyimpangan anggaran. Ujung-ujungnya menyelamatkan uang negara," ungkap Utut.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ini berharap nantinya akan ada punya panduan yang praktis terkait dengan audit internal yang akan dilakukan. Panduan tersebut penting, mengingat selama ini auditor seolah-olah menjadi

hantu yang menakutkan.

Antara auditor dengan yang diperiksa seringkali tidak ada komunikasi yang baik, sehingga yang bila auditor mendatangi suatu bagian atau instansi ia cenderung ditakuti. "Padahal ini loh yang mau gua periksa, ini *best practice*-nya, ini kisi-kisinya. Dengan adanya panduan, *do and done*-nya menjadi jelas," tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Idealnya, tambah Utut, ke depan IIA perlu mengundang perwakilan dari daerah untuk hadir pada forum seminar nasional dengan menghadirkan Menteri Keuangan RI dan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dengan begitu, bisa merumuskan kebijakan yang disepakati secara nasional dengan memperhatikan *local wisdom* dari setiap daerah.

Berbicara mengenai Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI sebagai Auditor Internal Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Utut berpendapat kinerja Ittama DPR RI sudah semakin membaik. "Memperbaiki diri itu kan perlu waktu, yang jelas reinya mengarah pada perbaikan. Mulai dari akuntabilitas, DPR *zaman now* yang bisa diakses masyarakat. Ke depan anggaran itu bukan hanya berdasarkan fungsi tetapi juga benar-benar untuk perbaikan DPR itu sendiri," pungkas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. ■ es/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I.
Erlangga Panji Samudro, S.Ikom,
Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom. Rahayu Setyowati,
Muhammad Husen Virginne Meiske Patuli,
Ria Nur Mega, Devi Inandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Singgih
Rimbani Kinanti, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum
Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki
Nugraha, Puntho Pranowo.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah
Geraldji Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari,
Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,
Safitri Restu Widyowati, SIP.

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dasang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Pemilu 2019 Jangan Buat Luka Baru di Masyarakat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menggugah kesadaran semua pihak agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 jangan sampai membuat luka baru di masyarakat. Dari hasil kunjungan ke berbagai daerah, rakyat banyak yang mengeluh lantaran lelah melihat pertikaian elite politik di televisi maupun di media sosial. Pemilu yang seharusnya dihadapi dengan adu ide dan gagasan, malah diwarnai dengan berbagai hujatan.

"Dengan mengedepankan rasa persaudaraan sebangsa, Forum Silaturahmi Anak Bangsa berhasil menutup dan menyembuhkan berbagai luka yang terjadi di awal-awal masa kemerdekaan. Jangan sampai menjelang 74 tahun Kemerdekaan Indonesia, kita justru membuat dan mewarisi luka baru akibat Pemilu 2019," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat membuka pertemuan Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) bertema 'Pemilu Mempersatukan Bangsa' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Berbagai tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut, antara lain Rosan Roeslani (Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Maruf Amin), Ahmad Riza Patria (Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno), Viryan Azis (Komisioner KPU), Sidarto Danusubroto (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), dan Sudarmo (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri).

Kemudian, Ketua Umum FSAB Suryo Susilo, Sarjono Kartosoewirjo (putera SM Kartosoewirjo), Ilham Aidit (putera DN Aidit), Catherine Pandjaitan (puteri Mayjen TNI Anumerta DI Pandjaitan), Djoko Purwongemoro (mantan Ketua Umum Pemuda Panca



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pertemuan FSAB bertema 'Pemilu Mempersatukan Bangsa'. Foto: Geraldil | HR

Marga) dan Witaryono Reksoprodjo (Koordinator Tim Advokasi Korban '65).

Bamsoet mengatakan jelang hari pencoblosan tanggal 17 April nanti, fenomena saling serang, fitnah, berita bohong (hoaks) serta ujaran kebencian masih terus didengungkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ironisnya, banyak masyarakat yang memercayai serta tidak sadar kondisi gaduh seperti itu berpotensi besar memecah belah bangsa Indonesia.

"Pemilu tinggal 20 hari lagi. Baiknya, elite politik dan para Tim Kampanye Capres-Cawapres harus memastikan para pendukungnya menggunakan cara-cara yang bijaksana dalam berkampanye. Mari hadapi Pemilu ini dengan penuh keceriaan, bukan dengan kebencian," ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, mewujudkan integrasi nasional bukanlah hal yang mudah. Karenanya, semua pihak harus mampu melepaskan ego maupun identitas dasarnya demi satu tujuan, yakni kejayaan Indonesia.

"Integrasi nasional yang akan menentukan eksistensi bangsa harus dipertahankan. Alangkah mirisnya jika integrasi yang dengan susah payah diwujudkan, harus tercerai berai akibat satu hal saja, seperti Pemilu misalnya," tegas Bamsoet.

Kepada masyarakat, Bamsoet mengimbau agar tidak terlalu larut dalam akrobat politik yang dijalankan oleh para elite politik. Karena pasca Pemilu 2019, tidak menutup kemungkinan para elite politik yang tadinya berseberangan, justru akan bergabung dalam satu barisan. Jangan sampai justru di akar rumput, rakyat masih terjebak dalam kubangan kebencian akibat 'sampah' kampanye yang tidak mencerdaskan.

"Kita sedang berdemokrasi yang mengedepankan rasionalitas. Bukan sedang bercinta, karena itu tak usah terlalu dibawa ke perasaan. Pilihlah pasangan yang dirasakan bisa membawa perbaikan, tanpa perlu memusuhi orang lain yang berbeda pilihan," pungkas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. ■ **ann/sf**

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersih, akses yang transparan, menjadi kunci penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas. Ini penting, karena menurut Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto, sampai saat ini DPT masih belum sepenuhnya clear. Ia menegaskan, DPT harus clear agar tidak ada kecurangan dan keributan pasca Pemilu.

"Supaya tidak ribut, tidak ada kecurangan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, atau merasa pihak yang diuntungkan, maka kita harus berangkat dari DPT yang *clear*, tidak ada DPT siluman, tidak ada DPT ganda, tidak ada data invalid," tandas Yandri saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Banten, baru-baru ini.

Sebagai Anggota Dewan yang bermitra dengan para *stakeholder* penyelenggara Pemilu dan sekaligus sebagai Anggota Dewan dapil Banten II, Yandri ingin memastikan provinsi yang bersebelahan dengan DKI Jakarta ini menjadi salah satu contoh sukses penyelenggara Pemilu. "Karena Banten dekat dengan Ibu Kota Negara perlu memastikan Banten sebagai salah satu contoh daerah yang Pemilunya itu benar-benar jujur adil dan transparan," papar Yandri.

Ia mengungkapkan, menurut laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), masih ada selisih sekitar 338.000 pemilih yang tidak tercermin dari perekaman KTP-elektronik maupun sisa yang belum merekam DPT-nya 8,1 persen. Sementara kalau ditotal antara yang sudah merekam dan belum merekam selisihnya hampir 400.000, maka tentu ada masalah di DPT.

Yandri menegaskan, jangan sampai ada warga negara yang memiliki hak pilih justru tidak bisa menggunakan haknya. Jangan sampai ada selundupan selundupan pemilih gelap yang memang tidak dibenarkan undang-undang, justru memilih. Ketidakterbacaan DPT bisa menjadi awal dari kecurangan, dan ketidaktransparan akan

Antisipasi Keributan Pemilu, DPT Harus Transparan



Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto. Foto: Eko I HR

”

**DPT HARUS CLEAR
AGAR TIDAK ADA
KECURANGAN DAN
KERIBUTAN PASCA
PEMILU.**

mempengaruhi kualitas Pemilu.

"Kita minta DPT supaya benar-benar *clear*. KPU tidak boleh menutup diri, perlu kerjasama semua pihak termasuk Bawaslu kemudian Dukcapil termasuk

pemerintah daerah," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurutnya, di Banten masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan kembali terutama masalah DPT, masih ada yang ganda, masih ada yang invalid, Yandri meminta kepala KPU menyelesaikan DPT agar benar-benar *clear*, tidak ada masalah, tidak ada orang yang kehilangan haknya.

"Kita minta kepada KPU, Bawaslu termasuk Dukcapil untuk mensinergikan kerjanya yang tinggal kurang lebih tiga minggu lagi. Tapi kita optimis bahwa Banten bisa aman nyaman tertib," jelas Yandri. ■ *eko/sf*

Open Parliament Tandai Babak Baru Praktik Demokrasi

DPR RI kini secara resmi telah bergabung dengan gerakan global menuju rezim keterbukaan. “*Open Parliament*” sendiri menandai babak baru dari praktik berdemokrasi di dalam negeri. Sesudah melalui berbagai fase berdemokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan kini kembali menjadi demokratis terbuka, Indonesia terus mencari bentuk pelebagaan demokrasi yang cocok untuk membangun kultur berdemokrasi yang lebih kuat dan terkonsolidasi.

“Saya kira setiap perjalanan demokrasi memang memiliki caranya sendiri. Demokrasi harus dibangun di atas kearifan lokal kita masing-masing dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan politik nasional kita yang berbeda-beda. Selain dimensi-dimensi yang bersifat lokal dan jamak, saya kira ada satu ciri tunggal demokrasi, yaitu partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Inilah jantung demokrasi yang ingin dijaga melalui komitmen Pemerintahan Terbuka dan Parlemen Terbuka,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat pembukaan “*Asia Regional Meeting on Open Parliament*” di Bali, Kamis (04/4).

Asia Regional Meeting on Open Parliament adalah acara yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerja sama dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD). Pertemuan regional yang dihadiri oleh delegasi dari delapan negara itu menjadi babak baru dari komitmen *Open Government Partnership* (OGP). *Open Government Partnership* (OGP) sendiri merupakan inisiatif multilateral yang dicetuskan pada 2011 untuk mempromosikan pemerintahan terbuka (*open government*), memerangi korupsi, memberdayakan masyarakat,



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat pembukaan “*Asia Regional Meeting on Open Parliament*” di Bali. Foto: Kemall HR

dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

OGP diluncurkan pada 20 September 2011 di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB oleh kepala negara dan pemerintahan dari delapan negara pendiri, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

“Ketika OGP diluncurkan, isu keterbukaan parlemen sama sekali belum tersentuh. Keterbukaan parlemen mulai jadi tema penting pada 2013, ketika kelompok kerja tematis baru tentang keterbukaan legislatif diperkenalkan pada KTT OGP di London. Sejak saat itulah parlemen juga dituntut untuk mempromosikan rezim keterbukaan. Beberapa negara, seperti Perancis dan Georgia, bahkan memperkenalkan rencana aksi nasional mereka sendiri,” tandas Fadli.

Dikatakan Fadli, komitmen tentang keterbukaan parlemen penting untuk diadopsi oleh semua negara. Apalagi, sebagaimana yang umum terjadi di negara-negara demokrasi, kepercayaan publik terhadap lembaga parlemen biasanya lebih rendah dibandingkan dengan institusi publik lainnya. Sebuah

studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa di sebagian besar negara demokrasi, hanya kurang dari setengah warga negara yang mempercayai parlemen. Bahkan di Amerika Serikat, misalnya, menurut data 2018 yang dikumpulkan oleh Gallup, kepercayaan pada legislatif hanya mencapai 40 persen saja.

“Di Indonesia, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik juga masih rendah. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sekitar 49 persen. Sesudah DPR RI melakukan Deklarasi Parlemen Terbuka, pada Desember 2018 lalu, kepercayaan publik terhadap parlemen mencapai 60 persen,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam kesempatan itu Fadli menyatakan, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna media sosial paling aktif di dunia. Saat ini ada lebih dari 88 juta pengguna media sosial di Indonesia. Itu sebabnya DPR RI memandang komitmen Parlemen Terbuka juga mesti menyesuaikan dengan gaya hidup digital warga negara. Komitmen keterbukaan parlemen menurutnya memang harus tersedia secara digital, serta mudah diakses oleh media sosial.

Di era digital seperti sekarang, sambungnya, cara untuk mengakomodasi aspirasi konstituen memang tidak hanya bersifat konvensional melalui tatap muka, melainkan bisa juga dilakukan melalui media sosial. Itu juga latar belakang kenapa DPR RI meluncurkan aplikasi mobile “*DPR Now!*”. *Platform digital* itu digunakan sebagai alat untuk menjembatani informasi antara DPR dengan masyarakat. Melalui aplikasi seluler ini, yang bisa diunduh melalui *Playstore* dan *Apple Store*, publik sekarang dapat memantau parlemen

secara aktif, baik melalui kanal *live streaming*, maupun berbagai unggahan lainnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu juga menyebut bahwa DPR RI saat ini juga sedang bekerja untuk secara bertahap membuat informasi parlemen yang lebih transparan, lebih *up to date* melalui pengembangan Sistem Informasi Legislatif (SILEG) yang akan memantau semua proses legislasi yang ada di Senayan.

"Pada intinya, DPR sedang mencari cara terbaik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses

pembuatan perundang-undangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebuah proyek percontohan telah dikembangkan melalui partisipasi publik dalam Sistem Perancangan Legislatif, saluran berbasis *web* untuk memastikan aspirasi dan pendapat publik bisa disalurkan melalui mekanisme *online*. Harapannya, melalui berbagai inovasi dan komitmen tadi, DPR mampu menyediakan produk legislatif yang lebih baik dan lebih akomodatif terhadap kepentingan rakyat," jelas legislator dapil Jawa Barat V itu.

Bagi DPR RI, lanjut Fadli, Parlemen Terbuka berarti bahwa parlemen

bertindak untuk memastikan publik dapat dengan bebas menggunakan hak dasar mereka yang merupakan hak untuk mengetahui yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi, terutama Pasal 28F. "Parlemen adalah wakil rakyat. Kami harus bertindak atas persetujuan rakyat. Untuk melayani kepentingan mereka, parlemen harus menyediakan berbagai infrastruktur pendukung untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi. DPR kini harus bisa hadir di genggaman tangan rakyat melalui *platform digital* yang interaktif," pungkasnya. ■ **dep/sf**

Penyelenggara Pemilu Harus Cermati KTP-el

Para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dari pusat hingga daerah, dari komisioner hingga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mencermati betul pemilik KTP-elektronik (KTP-el) yang digunakan dalam Pemilu serentak 2019. Persoalannya masih banyak ditemukan KTP rusak dan KTP WNA di berbagai daerah. Ini menuntut perhatian lebih penyelenggara Pemilu, agar kecurangan bisa ditekan.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Sumatera Selatan, Senin (01/4). "Penggunaan KTP-el walau sudah ada payung hukumnya dari MK (Mahkamah Konstitusi), namun belum menyelesaikan persoalan secara keseluruhan. Penyelenggara Pemilu harus hati-hati, karena KTP-el digunakan yang digunakan WNI dan WNA sama. Yang membedakan adalah bahasanya. Begitu juga penggunaan KTP rusak," tegasnya.

Sayangnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, petugas TPS tak bisa mendeteksi KTP-el yang sudah rusak atau dibuang oleh otoritas Dukcapil. Bila ada pemilih yang menggunakan KTP-el yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi itu, petugas TPS dipastikan tidak mengetahuinya. Begitu juga KTP-el milik WNA yang mungkin disalahgunakan dalam pemungutan suara. Para petugas TPS di desa-desa pulau terpencil mungkin tidak mengetahui ada pemilih yang melakukan kecurangan dengan KTP-el bermasalah.

"Di desa-desa pulau terpencil yang ada pekerja asingnya mungkin ada mobilisasi orang untuk menggunakan KTP-el milik WNA. Bahkan, mungkin ada yang menggunakan suket untuk tujuan negatif. Ini berbahaya. Sementara penyelenggara atau petugas TPS tidak punya alat untuk mendeteksi apakah pemilik KTP ini



Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo. Foto: Husen I HR

punya hak suara," kata legislator dapil Jawa Tengah III tersebut.

Diungkap Firman, banyak KTP-el rusak sudah pernah ditemukan di Banten dan Jawa Barat. Mungkin masih ada banyak KTP-el yang rusak lagi di daerah-daerah terpencil yang tidak terpantau. Ini harus jadi perhatian penyelenggara Pemilu dan pemerintah. Metode pengecekan harus dipikirkan sebelum hari pencoblosan. Semua penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum perlu mengantisipasi potensi kecurangan in. ■ **mh/sf**



Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang. Foto: Tiara IHR

Hak Pilih Warga Binaan Harus Menjadi Perhatian

itu hak warga negara. Maka sebagai representasi negara, kita wajib memfasilitasi penggunaan hak pilih mereka, khususnya warga binaan,” tutur Nasir.

Di samping itu, terkait tantangan bagi aparat keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dirinya berharap hal tersebut bisa berjalan secara aman, damai, dan sejuk. Nasir pun mengapresiasi sejumlah langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada April mendatang.

“Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, bisa sama-sama kita wujudkan. Tentunya netralitas aparat keamanan itu menjadi penting agar nantinya pelaksanaan Pemilu 2019 benar-benar bisa menjamin keamanan,” imbuh legislator dari Aceh itu.

Pada kesempatan yang sama, Kalapas Kelas I Medan dalam paparannya mengatakan dalam mengeksekusi pelaksanaan hak pilih untuk warga binaan bukan hal mudah. Meskipun di keseluruhan lokasi lapas sudah dibuat imbauan terkait tata cara mendapatkan formulir C5.

“Kami sudah buat imbauan kepada pengunjung lapas supaya mengirimkan NIK atau fotokopi KTP agar bisa dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena Dukcapil itu hanya boleh memasukkan orang yang sudah punya NIK. Tapi hingga saat ini tidak sampai 10 persen yang memberikan,” tandasnya.

■ tra/sf

Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang menekankan hak pilih warga binaan pada Pemilihan Umum (Pemilu) harus menjadi perhatian. Dirinya meminta agar seluruh warga binaan dapat dipastikan betul-betul menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Baru-baru ini, ia mendengar formulir C5 belum betul-betul bisa diterapkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

“Ini tentunya harus menjadi perhatian bersama, hal ini sangat perlu karena itu merupakan hak-hak politik mereka yang harus dilindungi,” jelas Junimart usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Sumatera Utara, Medan, baru-baru ini. Kunspek dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap.

Menanggapi penjelasan Kepala Lapas Kelas I Medan terkait pengurusan formulir C5 yang tidak semudah yang diharapkan, politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan akan membicarakan hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar seluruh warga binaan tersebut bisa menggunakan hak

”

BAHWA ADA SEBAGIAN MASYARAKAT TIDAK BOLEH MEMILIH KARENA TIDAK DAPAT FORMULIR C5, INI HARUS MENJADI PERHATIAN KEMENKUMHAM.

pilihnya dimanapun tempat binaan mereka.

“Karena hal ini nantinya bisa menjadi salah satu kasus yang nantinya bisa dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa ada sebagian masyarakat tidak boleh memilih karena tidak dapat formulir C5, ini harus menjadi perhatian Kemenkumham. Karena ini sensitif sifatnya,” tegas politisi daerah pemilihan Sumut III itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil (PKS). Ia menilai seluruh warga negara, dimanapun posisi dan keberadaannya harus bisa menggunakan hak pilihnya. “Karena

Komisi IV Dukung Mura Jadi Sentra Perikanan Sumsel

Sektor perikanan budi daya memiliki peranan penting untuk perekonomian daerah dan ketahanan pangan.

Melihat keberadaannya yang begitu strategis, Komisi IV DPR RI mendukung Kabupaten Musi Rawas (Mura) menjadi sentra perikanan budi daya air tawar di Provinsi Sumatera Selatan.

"Potensi budi daya ikan sangat tinggi. Kita lihat sudut-sudut Musi Rawas banyak sekali kolam ikan dan kita harapkan bisa menjadi penopang pangan untuk masyarakat Musi Rawas di daerah sekitarnya," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Desa Tegalrejo, Musi Rawas, Sumsel, baru-baru ini.

Diketahui, untuk memenuhi permintaan pasar, produksi harian perikanan budi daya Mura bisa mencapai 193,78 ton. Dengan jumlah itu, Mura mampu memenuhi kebutuhan ikan di Kota Lubuk Linggau dan Mura sendiri. Seiring perkembangan, Mura juga diharapkan mampu menjadi penopang pangan hingga Kota Palembang, Bengkulu dan Jambi.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan bibit dan pinjaman modal untuk meningkatkan produksi ikan air tawar sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.

Bantuan yang diberikan secara langsung berupa 4.800 ekor calon induk ikan Nila, 100.000 ekor benih ikan mas, 100.000 ekor benih ikan Nila, 10.000 ekor benih ikan patin, 100.000 benih ikan nilam, paket budi daya ikan lele teknologi bioflok, unit chest freezer serta bantuan pinjaman



Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau sentra perikanan Musi Rawas. Foto: Anne I HR

”

POTENSI BUDI DAYA IKAN SANGAT TINGGI. KITA LIHAT SUDUT-SUDUT MUSI RAWAS BANYAK SEKALI KOLAM IKAN DAN KITA HARAPKAN BISA MENJADI PENOPANG PANGAN UNTUK MASYARAKAT MUSI RAWAS DI DAERAH SEKITARNYA.

modal usaha sebesar Rp 2,042 miliar bagi pelaku usaha perikanan di Mura.

Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi berharap dengan pemberian bantuan benih tersebut, program dan bantuan yang diberikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya

oleh masyarakat. "Yang terpenting juga adalah pemberian pelatihan dan bimbingan, sehingga mereka bisa mandiri, karena ini merupakan mata pencaharian bagu mereka," tandas Fadholi.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjacto menyampaikan, akan segera membangun instalasi perikanan budi daya khusus untuk memproduksi calon induk (broodstock) dan benih ikan air tawar di Mura. Kelak, instalasi broodstock ini akan mampu memenuhi kebutuhan calon induk dan benih ikan air tawar di Pulau Sumatera.

Sebagai informasi, produksi perikanan budi daya se-Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 sebesar 70.731,86 ton tumbuh positif dari tahun sebelumnya sebesar 65.709,00 ton dengan luas lahan potensial mencapai 3.500 Hektar, sedangkan jumlah pembudidaya ikan tercatat sebanyak 4.635 orang. ■ ann/sf

Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna menilai, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) perlu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan penyaluran beras, pasca pengalihan program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2019.

“Saat ini penyaluran berasnya dipersempit setelah adanya program BPNT,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Perum Bulog Divre Kalbar di Gudang Bulog Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (01/4). Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan (F-PKB).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, dulu penyaluran Rastra, yang saat ini berubah menjadi BPNT, 100 persen dilakukan oleh Bulog. Sehingga beras Bulog pasti terserap dengan adanya program ini. Namun kini, pengalihan program tersebut dikhawatirkan akan membuat beras milik Bulog tidak terserap. Padahal perusahaan milik negara ini wajib menyerap beras dari petani.

“Program BPNT sendiri membuat peran Bulog semakin kecil. Sepengetahuan saya penyaluran yang dilakukan oleh Bulog lebih dominan di daerah Papua, sementara daerah lainnya kebanyakan swasta,” ujar politisi dapil Jawa Barat IX ini sembari mendorong adanya solusi atau strategi baru agar penyaluran beras milik Bulog dapat berjalan secara maksimal.

Sementara itu, Kepala Bulog Divre Kalbar Bubun Subroto juga berharap ada solusi baru dalam penyaluran beras milik Bulog. Terlebih perusahaan ini berkewajiban menyerap beras dari petani. Apabila penyaluran beras semakin sempit, kata Bubun, maka dikhawatirkan akan menurunkan serapan beras dari petani. “Karena penyaluran semakin menurun, maka agar penyerapan kembali naik, perlu ada solusi baru dalam penyaluran beras,” ujar Bubun.

Saat ini, diakuinya stok beras di

Bulog Perlu Solusi Salurkan Beras



Tim Kunker Reses komisi IV DPR RI meninjau Perum Bulog Divre Kalbar. Foto: Kresno I HR

”

SEHINGGA BERAS BULOG PASTI TERSERAP DENGAN ADANYA PROGRAM INI. NAMUN KINI, PENGALIHAN PROGRAM TERSEBUT DIKHAWATIRKAN AKAN MEMBUAT BERAS MILIK BULOG TIDAK TERSERAP.

Gudang Bulog masih cukup banyak, yang mana salah satu penyebabnya adalah karena terbatas penyaluran. Namun, kata Bubun jumlahnya saat ini tidak dalam keadaan over, lantaran jelang Ramadhan ini, Bulog

diharuskan memiliki stok yang cukup guna memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama beras.

Diketahui, hingga saat ini Bulog Divre Kalbar masih menyalurkan Rastra sesuai dengan pagunnya hingga Mei 2019. Bubun menyebut dalam 1 bulan sekitar 2000 ton beras disalurkan melalui program Rastra. “Adapun capaiannya saat ini mencapai 35 persen,” imbuhnya.

Direktur Operasional Perum Bulog Judith J Dipodiputro mengatakan pihaknya saat ini tengah memperkuat Bulog melalui sisi komersial, namun bukan berarti mengurangi secara penuh tugas untuk menyalurkan bansos program Rastra. “Tahun lalu Bansos Rastra dilepas dari Bulog, sehingga ini menjadi pertanda bahwa semakin pentingnya Bulog bertahan dengan terus mengedepankan pelayanan,” ungkap Judith. ■ eno/sf

Illegal Fishing Rusak Habitat Ikan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menegaskan, akibat aktivitas *illegal fishing* dan perburuan ikan dengan bom, mengakibatkan terumbu karang dan habitat ikan menjadi rusak. Untuk itu, pihaknya mendorong aparat terkait segera menindak dan melakukan pengawasan guna mengantisipasi semakin masifnya aktivitas ilegal itu.

Hal itu diungkapkan Michael di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, di Balai Wayang Kantor, Bupati Raja Ampat, Papua Barat, baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Bupati Raja Ampat mengeluhkan banyaknya

”

UNTUK ITU, PIHAKNYA MENDORONG APARAT TERKAIT SEGERA MENINDAK DAN MELAKUKAN PENGAWASAN GUNA MENGANTISIPASI SEMAKIN MASIFNYA AKTIVITAS ILEGAL ITU.

illegal fishing dan pemburu ikan menggunakan bom.

“Kami berharap semua masalah yang diungkapkan bupati bisa segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait

agar ekosistem terumbu karang dan ikan yang ada di Raja Ampat bisa terjaga dengan baik,” jelas Michael, sembari memimpin peninjauan langsung kegiatan dan hasil perikanan masyarakat dan melihat program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pertemuan itu, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati memaparkan, Raja Ampat memiliki luas wilayah sekitar 46.000 kilometer persegi, dengan 6.000 kilometer persegi berupa daratan, dengan luas 40.000 kilometer persegi sisanya lautan. Kawasan ini sudah cukup lama dijadikan kawasan wisata bahari.

Raja Ampat memiliki banyak potensi bahari, diantaranya 537 jenis karang dunia. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska (hewan lunak), dan 537 jenis hewan karang. Di Raja Ampat juga ada program terhadap 17 kampung dan melibatkan penduduk lokal yang sebagian besar nelayan. Nelayan dilatih membudidayakan ikan kerapu dan rumput laut. ■ man/sf



Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau kegiatan dan hasil perikanan masyarakat di Raja Ampat. Foto: Andri I HR

Pembangunan Tol KLBM Harus Terintegrasi Lintas Sektor

Pembangunan tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) diharapkan bisa menjadi akses antara wilayah selatan dan wilayah utara Jawa Timur, termasuk integrasi ke pelabuhan dan wilayah kawasan industri yang ada di kedua wilayah itu. Sehingga, tercipta sinergi saling koneksi antara bahan baku mentah dengan bahan baku setengah jadi atau bahan jadi. Diharapkan jalan tol ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kendaraan logistik dan penumpang massal yang akan semakin banyak.

“Saya menanyakan apakah ini sudah dilakukan suatu penelitian *load factor* masyarakat mau menggunakan jalan tol ini, ternyata sudah dan itu diharapkan *load factor-nya* bisa terpenuhi. Sehingga pengembalian utang ke bank yang demikian besar ini biayanya bisa terealisasi dengan baik,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Gresik, Jatim, Senin (01/4).

”

DIHARAPKAN JALAN TOL INI BETUL-BETUL BISA DIMANFAATKAN UNTUK KENDARAAN LOGISTIK DAN PENUMPANG MASSAL YANG AKAN SEMAKIN BANYAK.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bisa mengakomodir kebutuhan kawasan depo kontainer atau kontainer untuk kereta api yang rencananya akan dibangun di wilayah sekitar tol Lamongan – Gresik. “Diharapkan itu bisa untuk mengantisipasi penumpukan *loading* kendaraan- kendaraan pengangkut barang,” imbuh legislator dapil Jatim I itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengapresiasi pembangunan tol KLBM yang telah berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sehingga arus lalu lintas dari Tanjung Perak dan Gresik yang merupakan kawasan industri bisa menjadi jalur distribusi barang yang berjalan lancar. Ia melihat kendala pelepasan konsesi pembebasan lahan sudah selesai, hanya ada beberapa yang dititipkan konsinyasi di pengadilan, karena nantinya tol tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

“Pembebasan tanah itu ada mekanismenya. Dan kalau masyarakat belum bisa menerima (proses pembebasan tanah itu), tetapi sudah ada putusan pengadilan, mungkin pembayaran ganti ruginya dititipkan di pengadilan. Sehingga uang untuk pembayaran tanah mereka sesuai dengan apresiasi atau hasil daripada perhitungan yang dilakukan oleh tim resmi,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

■ azk/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Hardisoesilo berharap, setelah merger-nya Petrogas Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) bisa mengenyot capaian target pembangunan jaringan gas (Jargas) bagi rumah tangga dan sambungan rumah tangga (SR). Masuknya Jargas ke pelaku usaha mikro, dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

“Semua yang berhubungan dengan gas akan dilaksanakan oleh PGN sebagai leading sector. Karenanya, diharapkan target-target pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Baik yang dilaksanakan oleh PGN sendiri maupun dari Kementerian ESDM,” papar Hardisoesilo di sela-sela

”

**KEBERADAAN
JARGAS PGN SANGAT
MEMBANTU WARGA
SETEMPAT KARENA
EKONOMIS DAN AMAN.**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kampung Kue, Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI menerima keluhan dari beberapa warga pengusaha kue tradisional yang belum mendapatkan Jargas PGN. Karena tidak mendapatkan Jargas, sebagian warga menggunakan tabung gas Elpiji 3 KG, namun harga produksi melambung tinggi sementara ada kue yang tidak bisa terputus dalam proses produksinya, sehingga pelaku usaha kue merugi.

Menanggapi aspirasi tersebut, politisi Partai Golkar itu menuturkan keberadaan Jargas PGN sangat membantu warga setempat karena ekonomis dan aman. Karenanya, meskipun belum ada alokasi

PGN Didorong Capai Target Jargas



Anggota Komisi VI DPR RI Hardisoesilo. Foto: Suci I HR

anggaran khusus dari pemerintah, namun ia mendorong PGN mampu mengakomodir kebutuhan warga di Kampung Kue melalui Program Sayang Ibu milik PGN.

Ia menambahkan, industri kreatif kecil dan menengah seperti Kampung Kue perlu ditopang karena bisa bertahan saat kondisi ekonomi memburuk atau krisis moneter sekalipun. “Ibu-ibu di Kampung Kue kebanyakan pendatang. Pada saat krisis moneter melanda Indonesia suami mereka kehilangan pekerjaan,

sehingga membuat mereka inisiatif mencari penghasilan sehingga akhirnya komunitas kecil ini menjadi sentral komunitas kuliner,” jelas Hardisoesilo.

Politisi dapil Jawa Timur III ini juga berharap Kampung Kue bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya sebagai penggerak ekonomi warganya. Seperti yang dilakukan warga Kampung Kue, dimana mereka yang dulunya kampung miskin bangkit menjadi kampung berkekuatan ekonomis. ■ **sc/sf**

Pengecer BBM Harus Ditindak Tegas

Anggota Komisi VII DPR Ihwan Datu Adam menuturkan, pengecer bahan bakar minyak (BBM) harus ditindak tegas. Pasalnya, keberadaan pengecer BBM ditengarai menjadi penyebab kelangkaan BBM. Menurutnya, hampir setiap daerah yang dikunjunginya selalu ada pengecer BBM yang berpotensi menghabiskan stok BBM di SPBU. Bahkan, hampir setiap provinsi selalu ada pengecer BBM. Jika hal kecil ini bisa dicegah, maka kelangkaan bisa diminimalisir.

“Jadi memang hampir tiap daerah yang kami kunjungi, selalu ada permasalahan BBM, kelangkaan Elpiji dan macam-macam. Kita ingin ada semacam penegakan atau pengawasan terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan Pertamina. Bahkan

”

**KOMISI VII DPR RI
TELAH DIJADIKAN
MEDIUM UNTUK
MENERIMA KELUHAN
MASYARAKAT TERKAIT
KELANGKAAN BBM.**

kalau perlu dilibatkan Anggota DPR, sehingga tidak ada ‘kucing-kucingan’,” ujar Ihwan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Bahkan, ia pun mendorong agar Pertamina selalu siaga dan siap dengan segala potensi kelangkaan yang ada,

bahkan penambahan kuota perlu dilakukan. “Jangan menyalahkan satu dan lainnya. Saya tahu kelangkaan ini terjadi karena adanya pengecer, dan kami berharap harus tegas kepolisian di daerah. Kalau memang kurang kuotanya, ya tambah. Kalau perlu tambah 50 persen,” tegas Ihwan.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur ini pun menceritakan, dirinya sering sekali menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM. Bahkan ia mengungkapkan, saat ini Komisi VII DPR RI telah dijadikan medium untuk menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM.

“Sehingga antrean BBM ini perlu diantisipasi. Kita sering lihat banyak video diviralkan yang dikirim kepada kami, ini kami selalu menjadi tumpuan masyarakat untuk pengaduan, bukan lagi pemerintah,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Karena itu, Ihwan mengingatkan, ketegasan Pertamina adalah kunci untuk meminimalisir adanya kelangkaan BBM. Pengawasan SPBU menjadi hal yang penting dan urgent guna menyikapi persoalan kelangkaan BBM ini. ■ **hs/sf**



Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam. Foto: Hendra I HR

Pengelolaan Limbah Pertamina Dumai Masih Manual

Komisi VII DPR RI terkejut mengetahui pengelolaan limbah PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II, Kota Dumai, Provinsi Riau masih dilakukan secara manual. Pertamina merupakan perusahaan BUMN besar di Indonesia, seharusnya pengelolaan limbah lebih maju. Apalagi, menurut Anggota Komisi VII DPR RI Nasyrul Falah Amru, Pertamina dalam menjalankan usahanya menggunakan keuangan negara, sehingga harus lebih berhati-hati.

“Jangan kemudian (limbah) yang seharusnya yang sudah diangkat keluar, ternyata masih harus dilakukan pengeringan secara manual. Menyedot limbah dari bak penampungan ke tempat pengeringan juga dilakukan dengan manual. Menyedot limbah dengan mesin dumlipng seperti petani. Ini cermin yang kurang tepat,” ungkap Falah di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Dumai, Riau, Senin (01/4).

Sebelumnya, saat Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau langsung pengelolaan limbah ke kilang Pertamina RU II Dumai, terlihat kaget dengan pengelolaan limbahnya. Menurut Falah, Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia di bidang migas, seharusnya pengelolaan limbahnya lebih profesional daripada yang lain.

“Kalau kita lihat kurang memuaskan dan terkesan sangat jorok. Dalam hal ini kita menemukan beberapa limbah yang seharusnya ada di dalam gudang, ternyata ada di luar gudang dengan berbagai alasan. Itu salah. Sekali lagi itu salah. Karena itu bisa membuat mencemarkan lingkungan,” imbuh politisi PDI-Perjuangan ini sembari menyarankan Pertamina Dumai untuk belajar cara pengelolaan limbah kepada kilang Balongan.



Anggota Komisi VII DPR RI Nasyrul Falah Amru. Foto: Singgih I HR

Kenyataan yang ditemui Komisi VII DPR RI ini cukup mengejutkan, mengingat pada tahun 2018 lalu Pertamina RU II Dumai telah menerima penghargaan Proper Hijau atas ketaatan dan kinerja dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan selama tahun 2018. Penghargaan tersebut diserahkan

”

MENYEDOT LIMBAH DARI BAK PENAMPUNGAN KE TEMPAT PENERINGAN JUGA DILAKUKAN DENGAN MANUAL.

langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada RU II Dumai untuk Proper Hijau dan RU II Sungai Pakning untuk Proper Emas.

“Jangan asal memberikan predikat Proper dengan nilai hijau, sedangkan di lapangan faktanya kalau kita melihat masih merah mendekati kuning. Apa mungkin mendapatkan predikat Proper Hijau, tapi di lapangan terlihat sangat berantakan. Nah ini perlu kita pertanyakan kepada pemberi Proper.

Memberikan Proper itu kan tidak sembarangan. Pemberi Proper harus ikut mencium aroma dan melihat yang ada di lapangan sesuai dengan standar Proper itu sendiri atau tidak. Jadi jangan memberikan Proper seenaknya sendiri,” kritik Falah.

Legislator dapil Jawa Timur X itu meminta kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk lebih cermat dan teliti dalam memberikan Proper. Seharusnya ada audit terhadap temuan-temuan seperti ini dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau Proper Hijau tentunya semua sudah rapi, tidak ada kendala apapun terkait limbah. Baunya pun juga tidak ada,” tandas Falah.

Menurut Falah, sudah merupakan kewajiban DPR RI untuk memberikan kritik membangun guna memperbaiki pengelolaan limbah. “Karena limbah permasalahan kita bersama, apakah sudah sesuai dengan prosedur. Jika pengelolaan limbah Pertamina dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiganya juga harus kita sidak dan kita lihat apakah sudah sesuai dengan prosedur dan sudah memenuhi syarat sebagai perusahaan pengelola limbah,” imbuh Falah. ■ skr/sf

Perlu Pelatihan untuk Tangani Anak Perlindungan Khusus

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menilai perlu ada pelatihan dalam menangani anak dengan perlindungan khusus. Khususnya untuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), dirinya menilai, belum terintegrasinya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi korban dengan anak yang sekedar menjadi saksi.

“Saya kira perlu ada pelatihan dalam menangani anak-anak tersebut, sehingga dalam penanganannya bisa dibedakan tidak disamaratakan. Meskipun semua dikatakan anak (baik yang masih kecil maupun remaja) namun dalam hal penanganan tidak bisa serta merta disamakan. Ke depan perlu dipikirkan mekanisme penanganan itu,” jelas Endang usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru, Riau, Senin (01/4).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, di samping pembinaan, pemberian keterampilan juga merupakan hal penting. Misalnya saja pemberian edukasi non formal berbentuk homeschooling bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dan pemberian trauma healing bagi anak-anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Karena memang tipe-tipe anak itu kan bermacam-macam, penanganannya pun harus sesuai. Disesuaikan dengan kebutuhan yang dialami oleh anak. Anak-anak dalam perlindungan khusus ini harus diperlakukan dan ditangani secara tepat,” tandas Endang.

Oleh karena itu Endang berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) dapat memberikan edukasi teknis



Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti. Foto: Tiera IHR

”

DI SAMPING PEMBINAAN, PEMBERIAN KETERAMPILAN JUGA MERUPAKAN HAL PENTING

penanganan dalam menangani anak dengan perlindungan khusus tersebut. Sehingga nantinya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah memiliki misi yang sama, dan tidak bertentangan atau bertolak belakang dan sesuai dengan kearifan lokal.

“Persoalan-persoalan ini perlu dikaji lebih lanjut agar bagaimana nantinya kekerasan seksual itu bisa diminimalisir. Tentunya edukasi tidak bisa dilakukan sendiri tapi juga harus ada pelibatan masyarakat. Sehingga masyarakat itu nantinya menjadi jauh lebih cerdas dan tidak lagi terkapar mengenai kekerasan

seksual,” harap politisi dapil Jawa Barat III itu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Dahrius Husin menjelaskan, BRSAMPK Rumbai merupakan suatu balai yang memberikan penanganan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, khusus untuk wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Lampung. Anak-anak tersebut diberi penanganan khusus selama enam bulan agar kemudian anak-anak tersebut bisa keluar dengan mandiri.

“Jadi diharapkan nantinya setelah enam bulan anak itu keluar dengan mandiri bila hukum yang dijalaninya bukan merupakan hukum pidana yang berujung di penjara. Di BRSAMPK Rumbai juga memberikan pelayanan untuk rehabilitasi sosial untuk anak-anak misalnya korban tindak kekerasan yang mengakibatkan cedera dan terlantar itu diberikan pelayanan dan perlindungan khusus,” jelasnya. ■ tra/sf

Revitalisasi Asrama Haji Banjarmasin Sesuai Anggaran



Anggota Komisi VIII DPR RI Bambang Budi Susanto. Foto: Chasbi/MI

Anggota Komisi VIII DPR RI Bambang Budi Susanto menilai, dengan anggaran sebesar Rp 43 miliar, revitalisasi UPT Asrama Haji Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dinilai sudah sesuai dan bagus. Pembangunan gedung pada tingkat satu hingga tingkat empat Asrama Haji Banjarmasin sudah sesuai dengan anggaran yang telah diberikan.

“Kalau menurut saya, bangunan sudah sesuai dan bagus. Hanya saja kami menemukan bagian atap yang terlihat bocor dan tanaman yang kurang bagus,” nilai Budi di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau UPT Asrama Haji Banjarmasin, Kalsel, Senin (01/4).

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI mendatangi Asrama Haji Banjarmasin

”

MEMANG TERLIHAT SEDIKIT KEKURANGAN PADA BAGIAN TERTENTU, TETAPI ITU BISA DIPERBAIKI.

guna melihat situasi dan progres revitalisasi di lapangan. “Memang terlihat sedikit kekurangan pada bagian tertentu, tetapi itu bisa diperbaiki. Jika sudah bagus ya dirawat, jika kurang bagus ya diperbaiki secara maksimal,” tambah legislator dapil Jawa Timur IX itu.

Budi menambahkan, anggaran

perawatan harus ditambah setiap tahunnya. Misalnya Rp 300 atau 400 juta, sehingga bisa membenahi bagian lainnya. “Bila perlu tiap tahun Rp 500 juta lewat Menteri Agama. Dengan anggaran tersebut bukan hanya perawatan saja, bisa juga untuk yang lainnya, seperti tanaman dan lain-lain,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dalam hal bersamaan, Kepala UPT Embarkasi Asrama Haji Banjarmasin Faisal mengatakan, atap bangunan tersebut tidak bocor, “Itu jenis atap transparan terbuat dari akrilik, ketika matahari terang menjadi panas. Itu tidak rusak,” kilah Faisal. Sementara untuk tanaman, ia menjelaskan bahwa itu merupakan sumbangan dari pegawai yang bekerja di Asrama Haji Banjarmasin. ■ cas/sf

Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang diapresiasi oleh Komisi IX DPR RI. Hal ini menjadi indikasi telah terciptanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Tangerang, Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha, sehingga menghasilkan UMK sesuai harapan buruh. Namun Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mengingatkan, akibat pengupahan yang tinggi karena pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sektor investasi pindah dari Kota Tangerang ke daerah lain. Pemkot

Pemkot Tangerang Diminta Antisipasi Perpindahan Sektor Investasi



Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea. Foto: Andri/imi

Tangerang diminta mengantisipasi hal itu.

“Secara umum di Banten ada kontra pertumbuhan investasi dengan pertumbuhan pengangguran. Pertumbuhan investasi meningkat, tapi pengangguran juga meningkat. Hal ini akibat pergeseran padat karya kepada padat modal. Selain itu, akibat upah yang tinggi, terjadi perpindahan sektor industri, maka munculah pengangguran,” analisa Marinus usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Tangerang beserta

Legislator Imbau Pemerintah Dukung Pelestarian Budaya Asli Bali

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad mengatakan, dalam konteks akulturasi budaya, keseluruhan budaya-budaya yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali harus tetap mempertahankan budaya asli. Noor mengimbau Pemerintah Pusat untuk bisa menopang untuk melestarikan budaya asli Bali, khususnya yang ada di Denpasar.

“Harus ada regulasi yang memproteksi, akulturasi budaya dengan

”

HARUS ADA REGULASI YANG MEMPROTEKSI, AKULTURASI BUDAYA DENGAN BUDAYA LAIN TERMASUK BUDAYA ASING, TIDAK MENGIKIS NILAI-NILAI LUHUR BALI.

budaya lain termasuk budaya asing, tidak mengikis nilai-nilai luhur Bali,” ujar Noor Achmad usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan infrastruktur promosi dan dampak bencana terhadap pariwisata ke Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, baru-baru ini.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini menyoroti kecilnya jumlah dana APBD dan PAD Denpasar. APBD Denpasar hanya berjumlah Rp 2 triliun, sedangkan PAD Denpasar hanya sebesar Rp

jajaran di Balai Kota Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, dengan adanya pengangguran yang mencapai 7,17 persen di Kota Tangerang, dinilai cukup signifikan dan mengganggu ekonomi masyarakat. Untuk itu, ia mendorong perlu adanya inovasi dan kebijakan baru dalam rangka untuk tetap mempertahankan investasi di Kota Tangerang, dengan mempertimbangkan agar para pengusaha tetap survive. Di sisi lain, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan pun dirasa perlu, guna menurunkan tingkat pengangguran.

“Pelatihan kepada masyarakat itu penting. Kita tahu datanya pengangguran paling tinggi itu di tingkat SMA dan sederajat, karena dinilai belum siap terjun ke dunia kerja. Sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan skill dalam bekerja. Pemerintah harus mendorong upaya pelatihan kepada tenaga kerja, sehingga tenaga kerja ini dapat tersalurkan dengan baik,” saran

legislator dapil Banten III itu.

Senada diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengapresiasi tingginya UMK di Kota Tangerang yang telah sesuai harapan buruh. Namun ia mengingatkan, tingginya UMK ini bak dua sisi mata



SECARA UMUM DI BANTEN ADA KONTRA PERTUMBUHAN INVESTASI DENGAN PERTUMBUHAN PENGANGGURAN. PERTUMBUHAN INVESTASI MENINGKAT, TAPI PENGANGGURAN JUGA MENINGKAT.

uang. Di satu sisi, tingginya upah ini menguntungkan dan memberikan hak kepada buruh di Kota Tangerang secara layak. Namun di sisi lain berpotensi

menimbulkan pengangguran.

“Ada perusahaan yang khawatir tidak mampu membayar upah itu, nantinya perusahaan malah pindah (ke daerah lain) untuk mencari upah yang lebih murah. Akibatnya banyak pengangguran. Supaya perusahaan tidak pergi, harus ada ‘kemesraan’ antara pengusaha dengan buruh di Kota Tangerang. Harus rajin komunikasi yang bagus antara pengusaha dan para buruh. Kalau itu dilaksanakan, saya kira persoalan upah yang selama ini banyak terjadi di daerah lain, tidak akan terjadi di Kota Tangerang,” harap legislator dapil Banten III itu.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjelaskan bahwa UMK di Kota Tangerang sudah cukup tinggi, mencapai Rp 3,869 juta. Ia mengklaim, daerah yang dipimpinnya memiliki UMK tertinggi ketiga se-Indonesia. Ia menambahkan, Kota Tangerang sedang proses pengembangan yang bermula kawasan industri, akan dijadikan konsep Aerotropolis, dimana tata letak, infrastruktur dan ekonomi berpusat pada bandara. ■ **sf**

800 miliar. Padahal, Denpasar-Bali menyumbang sebesar Rp 50 triliun ke pemerintah pusat.

“Bali juga menyumbang Rp 50 triliun ke pusat, namun demikian, ke APBD Denpasar sangat kecil jumlahnya yaitu hanya berjumlah Rp 2 triliun, PAD mereka juga hanya Rp 800 miliar. Oleh karena itu, supaya ini juga bisa menjadi perhatian Pemerintah Pusat kepada Denpasar, Bali,” tandas Noor.

Legislator dapil Jawa Tengah II ini pada kesempatan yang sama menegaskan, Komisi X DPR segera mengundang Kementerian Pariwisata untuk mengkoordinasikan persoalan yang muncul di Denpasar-Bali. Kementerian Pariwisata khususnya dalam hal ini Deputi Infrastruktur, diminta untuk bisa memberikan dukungan bantuan infrastruktur ke Denpasar-Bali.

“Deputi Infrastruktur Kemenpar diminta untuk bisa memberikan

bantuan infrastruktur ke Denpasar-Bali, khususnya destinasi wisata yang saat ini kurang begitu baik. Supaya ke depannya tidak ada kendala, maka

koordinasi dengan Kemenpar menjadi sangat penting,” pungkas Noor Achmad.

■ **pun/sf**



Tim Kunspek komisi X DPR RI berkunjung ke kantor Wali Kota Denpasar. Foto: Guntur IHR

Komisi XI Serap Informasi Kondisi Ekonomi Jatim



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. Foto: rig | HR

Tim Kunjungan Kerja Komisi Reses XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, BPS, BPK dan BPKP untuk mendapatkan data serta informasi mengenai rencana pembangunan di Jatim, inflasi, pertumbuhan ekonomi, capaian kinerja pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, data statistik terkait kondisi sosial dan ekonomi, serta kendala yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan.

"Pertemuan ini ingin melihat perekonomian di Jawa Timur. Peralpnya, berdasarkan data yang diperoleh dari KEKR (Kajian Ekonomi Regional) Bank Indonesia Jawa Timur bulan Februari 2019, ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2018 tumbuh mencapai 5,7 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III 2018 yaitu 5,4 persen. Secara kumulatif, kinerja ekonomi Jawa Timur tahun 2018 tumbuh meningkat sebesar 5,50 persen dibandingkan 5,46 persen

pada 2017," jelasnya saat membuka pertemuan di Surabaya, Jatim, baru-baru ini.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, perkembangan realisasi APBN tahun 2019 periode sampai dengan 28 Februari 2019 menunjukkan capaian positif yang terlihat dalam realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 177,24 triliun atau 9,92 persen dari target APBN 2019, atau tumbuh 9,97 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada APBN tahun 2018 sebesar Rp 161,17 triliun.

"Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 160,84 triliun atau 10,20 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 4,66 persen. Sedangkan realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 16,39 triliun atau 7,85 persen dari target dalam APBN 2019, tumbuh sebesar 119,05 persen. Ini sangat bagus dan perlu adanya sinergi antar pemda," jelas legislator dapi Jatim II itu.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui temuan BPK Perwakilan

”

SECARA KUMULATIF, KINERJA EKONOMI JAWA TIMUR TAHUN 2018 TUMBUH MENINGKAT SEBESAR 5,50 PERSEN DIBANDINGKAN 5,46 PERSEN PADA 2017

Jatim terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Jatim, serta program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BPKP terhadap pemerintah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. "Karena ada Dana Desa yang digulirkan cukup besar, kami ingin tahu bagaimana pembinaan dari hingga pengawasan yang dilakukan BPK Jawa Timur," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan, Jatim merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan negara terbesar. "Misalnya pabrik rokok, kan merupakan penghasil bea cukai. Kemudian emas. Yang seperti ini perlu dijaga karena selain memebrikan kontribusi untuk pendapatan negara juga dapat menyerap sumber daya manusia dan menurunkan kemiskinan. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mereka tetap berinvestasi di sini," jelas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ rnm/sf

Dana Desa Diharapkan Tingkatkan SDM Bali

Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menilai, pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Bali seharusnya tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, namun juga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Meski infrastruktur desa di Bali sudah terbangun secara baik, Tuti mendorong agar pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan SDM, sehingga turut mengentaskan kemiskinan.

"Saya selalu menyampaikan, khususnya kepala desa beserta seluruh aparatur desa di Bali, agar melibatkan pemuda-pemuda asli desa untuk membangun desanya. Jangan sampai, pemuda meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di kota," ujar Tutik, usai pertemuan Tim Kunjungan

Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPS, BPK dan BPKP, di Gedung Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Bali, Senin (01/4).

Selain itu, Tutik mengapresiasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dinilainya sudah cukup bagus di Bali. Namun demikian, Tutik menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang tak kunjung memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Saya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar mereka menggunakan peluang KUR yang sangat bagus ini secara optimal," tandas Tutik.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Bali ini pada kesempatan yang sama menyampaikan, oleh karena Bali

adalah jendela tujuan wisata dunia, maka seluruh potensi SDM di Bali harus mempunyai pemikiran yang visioner ke depan. Apalagi, dengan memanfaatkan peluang yang begitu banyak tersedia di Bali, seperti sektor pertanian.

"Bali mempunyai lahan tidur yang sangat banyak, sisi sektor pertanian juga harus ditingkatkan, kemudian peluang ekspor juga sudah diberikan berbagai kemudahan. Untuk itulah, saya mendorong kepada masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mari kita harus bekerja keras," pungkas politisi Partai Demokrat tersebut. ■ pun/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani. Foto: Purntio I HR

Anggota Komisi II DPR RI Andi Mariattang yakin penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan akan bekerja secara maksimal dalam mensukseskan ajang pesta demokrasi lima tahunan bagi rakyat Indonesia itu. Diakuinya, Pemilu yang digelar 17 April 2019 ini terasa lebih berat, karena digelar secara serentak.

"Pemilu saat ini memang terasa berat, karena merupakan Pemilu serentak. Berdasarkan pengalaman kami di Sulawesi Selatan, kami merasa yakin dengan kemampuan penyelenggara Pemilu di Sulawesi Selatan yang akan bekerja secara maksimal," tutur Andi di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Andi menyampaikan, masih banyak masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah melakukan perekaman KTP-elektronik, tetapi KTP-el tersebut

Komisi II Yakin Penyelenggara Pemilu Sulsel Bekerja Maksimal

belum terbit. "Terkait hal ini, KPU sudah mengantisipasinya. Kita tentu memberikan *support* kepada penyelenggara Pemilu supaya semua bisa berjalan lancar," ucap legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Hal lain yang juga masih mengalami kendala yakni program Bawaslu tentang pelatihan bagi para saksi dari parpol yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Oleh karenanya kami mendorong agar Bawaslu bisa melakukan pendekatan kepada partai politik, agar mereka dapat memasukkan daftar saksi untuk dilatih. Karena hal itu sangatlah penting,"



Anggota Komisi II DPR RI Andi Mariattang. Foto: Dep I HR

tegas Andi.

Legislator dapil Sulsel II itu mengatakan, berdasarkan beberapa laporan, Sulsel termasuk daerah yang rawan konflik Pemilu. "Saya juga berharap agar proses simulasi tentang tata cara melakukan pencoblosan dalam Pemilu bisa terus diefektifkan dan dimasifkan. Kami akan tetap terus memantau bilamana ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan," tutupnya. ■ dep/sf

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipengaruhi Konsumsi dan Investasi



Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal. Foto: Arief I HR

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menilai, tren positif pertumbuhan ekonomi nasional masih bisa terus berlanjut tahun 2019. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi akan banyak dipengaruhi konsumsi dan investasi. Dua sektor ini diharapkan jadi motor penggerakannya. Selain itu, konsumsi pemerintah dan perdagangan internasional juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Perekonomian nasional pada tahun 2019 diperkirakan masih melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3 persen,” kata Refrizal usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI),

”

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN INI DIPREDIKSI AKAN BANYAK DIPENGARUHI KONSUMSI DAN INVESTASI.

dan Askrindo, di Kantor Perwakilan BI Sumatera Barat, Padang, baru-baru ini.

Pemerintah, lanjut legislator F-PKS itu, akan berupaya menjaga tingkat keyakinan masyarakat agar konsumsi, keberlangsungan usaha dan investasi tetap meningkat di tengah bangsa yang akan menggelar Pemilu serentak, baik Pemilihan Legislatif

maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu yang sedang digalakkan atas upaya tersebut adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar ekonomi rakyat terus meningkat.

“Dengan pola KUR yang telah berjalan, kami dari Komisi XI DPR RI mengharapkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 akan mewujudkan lembaga perbankan sebagai *agent of community development* dan *agent of asset distribution*. Perbankan harus tumbuh dan berkembang sebagai institusi yang mampu memberdayakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan koperasi,” imbuh politisi dapil Sumbang II ini.

Selain itu, perbankan juga harus mampu menciptakan kesempatan bagi rakyat miskin, membangun jaringan bisnis, mampu menjadi media pemerataan hasil pembangunan, dan mampu menyediakan jasa keuangan yang efektif dan efisien bagi UMKM, koperasi, dan masyarakat. Refrizal melanjutkan, dalam pertemuan ini pihaknya menyerap data dan informasi aktual terkait perekonomian yang dibutuhkan Komisi XI DPR RI.

“Komisi XI DPR RI juga ingin mendapatkan informasi dari Bank Indonesia mengenai kondisi ekonomi di wilayah Sumatera Barat yang meliputi perkembangan kondisi makro ekonomi, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan prospek perekonomian saat ini,” tutup Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini. ■ **afr/sf**

Perlu Peningkatan Peran APIP dalam Akuntabilitas Dana BOS



Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmi. Foto: Sud I HR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmi mengungkapkan perlunya peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mencapai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akuntabel.

Hal itu diungkapkan Helmi, sapaan akrabnya, usai memimpin Tim PKAKN BK DPR RI bertemu dengan Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surakarta terkait akuntabilitas Dana BOS, di Kediaman Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (05/4).

"Di Kota Surakarta ini ada temuan secara administratif, yaitu karena ketidaktahuan kepala sekolah terkait rekening dana BOS yang harus dilaporkan kepada Wali Kota. Selain itu juga ada temuan dengan jumlah yang sangat kecil, dari 24 sekolah, ada dana yang belum dikembalikan ke rekening umum daerah," jelas Helmi.

Helmi menjelaskan, hal tersebut terjadi karena adanya ketidaktahuan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu perlu

dilakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah mengenai aturan penerimaan dan pengelolaan dana BOS di Kota Surakarta, guna mencegah terjadinya kembali temuan, terutama yang bersifat administratif.

Selain itu, guna mencapai penyaluran dana BOS tepat sasaran, perlu juga diperhatikan sinkronisasi data sekolah, siswa, dan guru. "Perlu adanya peran dari APIP dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap guru-guru yang aktif, menjelang pensiun, maupun guru tidak tetap di Kota Surakarta, agar penyaluran dana BOS tepat sasaran.

Melalui pertemuan ini, PKAKN mendapati bahwa perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) guru yang berintegritas tinggi untuk dapat mengelola dana BOS. "Ini peran dari Dinas Pendidikan untuk membina sekolah-sekolah dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, hingga SMA/SMK terkait pengelolaan dana BOS," jelas Helmi.

Sekolah harus mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan serta pertanggungjawaban terhadap

penggunaan dana BOS. "Sekolah-sekolah harus paham mengenai peraturan Kementerian Dalam Negeri, aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan aturan-aturan lain di Kabupaten/Kota. Jika perlu, dapat dibuat tim khusus, di luar guru, yang bertugas secara khusus mengelola dana BOS," ujar Helmi.

Senada dengan Helmi, Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo juga menjelaskan hal yang sama. "Temuan-temuan yang sederhana itu bisa diselesaikan. Solusinya peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan ini harus dipahami dengan persepsi yang sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain," jelasnya.

Rudi, sapaan akrab Wali Kota Surakarta itu juga menegaskan bahwa pentingnya memaksimalkan dan meningkatkan peran APIP, karena pendampingan dan pembinaan adalah hal utama yang harus dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana BOS ■

ica/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan sambutan peluncuran perangkat bantu daring (online toolkit) tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) kerjasama dengan ASEAN Parliamentarians for Human Right (APHR) dan National Democratic Institute (NDI), di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (01/4).
Foto: Jaka | HR



Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menerima mahasiswa Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4). Foto: Kresno/rni



Pranata Humas Muda Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dewi Maheswari saat menerima kunjungan mahasiswa BSI dan Unpas di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4). Foto: Gerald | HR

